

HARI PERTAMA BUKA USAI 'LOCKDOWN'

DPRD Yogya Maraton Bentuk 6 Pansus

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya maraton membentuk enam panitia khusus (pansus) di hari pertama kerja setelah dua pekan menjalani *lockdown*. Keputusan tersebut ditetapkan melalui sidang paripurna dengan protokol kesehatan yang ketat, Senin (8/2).



Sidang paripurna DPRD Kota Yogya di hari pertama usai ditutup dua pekan.

KR-Ardhi Wahdan

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiyatmoko, menjelaskan enam pansus yang dibentuk tersebut terdiri dari empat pansus pembahasan raperda dan dua pansus pengawasan.

"Pimpinan dan anggota pansus sudah kami minta untuk menggelar rapat internal terkait teknis pembahasannya. Protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan," tandasnya usai sidang paripurna.

Penyelenggaraan sidang paripurna kemarin hanya diwakili tiga anggota dari tiap fraksi yang mengikuti secara langsung, selebihnya mengikuti secara virtual. Begitu juga peserta sidang dari unsur eksekutif yang hanya kehadiran fisiknya diikuti perwakilan kepala daerah serta beberapa pejabat. Sementara empat pansus membahas raperda ialah terkait bangunan gedung, pajak elektronik, penyakit menular, dan

penerangan jalan umum. Sedangkan dua pansus pengawasan terkait Covid-19 dan pokok pikiran dewan.

Danang menjabarkan, penutupan aktivitas di gedung DPRD Kota Yogya dilakukan sejak 29 Januari 2021 lalu. Langkah itu diambil setelah salah satu ASN di Sekretariat Dewan yang meninggal dunia terpapar Covid-19. Sehingga diperlukan sterilisasi sekaligus upaya tracing. "Khusus untuk anggota dewan sebetulnya hanya libur dua hari kerja karena pada 29 Januari hingga 3 Februari menjalani reses. Sampai sekarang pun kita belum membuka tamu dari luar," jelasnya.

Dari proses tracing yang dilakukan, diketahui ada satu ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah mengalami gejala ringan. Dirinya pun meminta sia-

pa pun yang mengalami gejala demam untuk segera istirahat dan menghubungi fasilitas layanan kesehatan. Upaya tracing masih akan terus dilakukan sampai ada kepastian dalam memutuskan mata rantai penularan.

Danang juga berpesan kepada masyarakat luas agar mematuhi pembatasan kegiatan yang digulirkan pemerintah. Dirinya memahami pada situasi saat ini kondisi masyarakat cukup gelisah antara harus menghidupi keluarga dengan membatasi kegiatan. Akan tetapi fasilitas isolasi di Kota Yogya baik yang disediakan rumah sakit maupun pemerintah dan komunal, jumlahnya terbatas. "Bukan pemerintah melarang, tetapi upaya mengendalikan paparan yang lebih luas. Lebih baik menjaga diri dengan tetap meningkatkan imunitas serta berperilaku aman menerapkan 5M," pesannya. **(Dhi)-f**

VIRAL DUGAAN PELECEHAN VERBAL DI MALIOBORO Jaga Citra Yogya, Semua Harus Duduk Bersama

YOGYA (KR) - Unggahan di media sosial berupa Twitter terkait dugaan pelecehan verbal di Malioboro yang dilakukan oleh petugas keamanan di sana, menimbulkan komentar beragam. Semua pihak terutama pengunggah, oknum petugas keamanan atau Jogoboro serta dinas terkait pun diminta duduk bersama guna menjaga citra pariwisata Yogya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menilai Malioboro merupakan ikon pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian. Sehingga ketika ada masalah kepariwisataan diharapkan bisa selesai dan ada saling pengertian guna mendapatkan solusi. "Apapun masalah yang terjadi di Malioboro mari cari solusi sama-sama. Termasuk soal pengakuan adanya perilaku tidak menyenangkan yang diunggah di medsos oleh netizen terkait sikap Jogoboro, sebaiknya memang ada mediasi," katanya, Senin (8/2).

Menurutnya, mediasi diperlukan agar informasi ke publik lebih terbuka terutama untuk memberikan solusi atas masalah yang ada. Mediasi penting dilakukan oleh UPT Pengelolaan Cagar Budaya yang membawahi Malioboro sekaligus mewakili petugas Jogoboro dan netizen yang mengunggah. Hal ini karena setiap masalah di Malioboro berdampak pada citra pariwisata Yogya.

Oleh karena itu, mediasi atau duduk bersama itu supaya semua mengetahui aturan mana yang perlu ditaati dan dijalankan dan bagaimana semestinya pelayanan berkaitan kebijakan kepariwisataan di Malioboro. Apalagi selama masa pembatasan maka setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan harus dilaporkan ke petugas, termasuk aksi sosial berbagi makanan kepada masyarakat ekonomi lemah. "Jangan sampai muncul opini seolah semua petugas Jogoboro berperilaku negatif. Ini yang perlu diklari-

fikasi, dimediasi. Tetapi Jogoboro juga harus bertanggung jawab berkaitan kenyamanan dan keamanan wilayah Malioboro," katanya.

Khusus untuk Jogoboro, disoroti juga soal adanya pola dan gaya berkomunikasi. Semua perlu memahami bagaimana pelayanan kepada wisatawan yang sudah ada standar dan harus mengedepankan keramahan, kenyamanan serta etika.

Kepala UPT Pengelolaan Cagar Budaya Ekawanto, menyebut dugaan pelecehan verbal itu terjadi Sabtu (6/2). Yakni adanya beberapa petugas yang melakukan *cat calling* serta mengomentari gaya berpakaian terhadap salah seorang pengunjung perempuan. Petugas yang bersangkutan juga telah mendapat sanksi serta pembinaan dari komandan regunya. Akan tetapi jika tindakan oknum petugas terbukti melanggar aturan maka surat peringatan akan dilayangkan. **(Dhi)-f**

DORONG PERKEMBANGAN PRODUK LOKAL Perlu Kesadaran, Fasilitas dan Regulasi

YOGYA (KR) - Untuk mendorong tumbuh-kembangnya produk-produk lokal, menurut Ir Bambang Suwignyo SPT MP PhD IPM ASEAN Eng, tidak cukup hanya ditanamkan untuk bangga saja. Tetapi juga harus disadarkan untuk membelinya. Untuk itu pemerintah perlu membangun fasilitas maupun regulasi.

"Bangga saja tidak cukup kalau tidak mau membeli. Untuk apa bangga kalau tidak mau membeli," kata Bambang Suwignyo yang juga dosen Fakultas Peternakan UGM dalam dialog interaktif kerjasama RRI dan Pengda Kagama DIY, Senin (8/2).

Bambang Suwignyo yang pengurus Bidang Kajian dan Pengabdian Masyarakat Pengda Kagama DIY menjelaskan, sosialisasi supaya masyarakat mengenal



Bambang Suwignyo

KR-Luthfie

lebih dekat. Karena kalau tidak mengenal jadi tidak sayang. Selanjutnya dilakukan fasilitasi. Apa yang perlu difasilitasi, apakah menumbuhkan industrialisasinya, pengembangan developernya, atau standarisasinya. Terakhir perlu didukung regulasi. Dicontohkan di Kulonprogo ada produk AirKU yang diregu-

lasikan, sehingga setiap acara, setiap rapat, wajib menggunakan produk AirKU.

"Jadi sosialisasi, fasilitasi dan regulasi ini yang terus dibangun ini akan mempercepat akselerasi dan tumbuh-kembangnya UKM yang kualitas produk-produknya dan layak untuk diapresiasi sebagai bagian untuk membangun ekonomi Indonesia," jelasnya.

Ditambahkan, produk-produk daur ulang sampah sebenarnya juga bisa diregulasi. Tentu saja untuk produk-produk yang berkualitas. Sebab sebenarnya banyak produk yang berasal dari sampah, seperti kerajinan dari enceng gondok dan gedebok pisang yang justru diekspor ke luar negeri. Untuk itu ada standarisasi SNI. **(Fie)-f**

MASA PERPANJANGAN PTKM TAHAP III Kelurahan Zona Merah, Penanganan Lebih Ketat

YOGYA (KR) - Kota Yogya diharapkan mampu lebih sigap dalam menghadapi pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) tahap III hingga 23 Februari 2021. Wilayah atau kelurahan yang masuk zona merah akan mendapatkan penanganan yang lebih ketat.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, inti kebijakan PTKM periode kali ini ialah lebih memperhatikan aktivitas masyarakat di level bawah. "Mulai dari tingkat kelurahan, kampung, RW hingga RT. Teknisnya sedang kita garap. Yang jelas kelurahan zona merah tentu akan lebih ketat dibanding yang zona oranye, kuning maupun hijau," jelasnya, Senin (8/2).

Dari 45 kelurahan yang ada di Kota Yogya, akhir pekan kemarin hanya lima kelurahan yang masuk zona merah. Pola penanganan di sana pun

akan menyesuaikan dengan instruksi Gubernur maupun kebijakan di tingkat pusat. Kendati demikian, dari sisi kelembagaan di wilayah, Kota Yogya sudah tidak ada persoalan. Apalagi gugus tugas penanganan Covid-19 juga sudah sejak awal terbentuk hingga wilayah.

Selain itu keberadaan komunitas Jaga Warga sudah terbentuk sejak beberapa tahun lalu di tingkat RW. Dengan begitu, meski kelak ada pembatasan yang ketat bagi kelurahan zona merah namun pengawasannya tidak akan ada persoalan. "Secara garis besar hampir sama dengan pola penanganan pada awal pandemi dulu. Di mana peran di wilayah paling dioptimalkan," imbuhnya.

Menurutnya, pada PTKM tahap III kali ini justru aktivitas sosial ekonomi lebih longgar dari sebelumnya. Di an-

taranya menyangkut kebijakan bekerja dari rumah maupun kapasitas makan di tempat menjadi 50 persen. Begitu juga penutupan jam operasional diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB. Hanya, wilayah yang angka penyebaran Covid-19 masih tinggi diimbau mengurangi aktivitas ke luar. "Bukan dilarang, tetapi jika bisa dikerjakan dari rumah itu lebih baik," tandasnya.

Terkait efektivitas PTKM dalam pengendalian laju pertambahan Covid-19, menurut Heroe belum dapat disimpulkan. Hal ini karena masa inkubasi virus ialah 14 hari, sehingga dampaknya bisa disimpulkan dua pekan setelah PTKM diberlakukan. Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat. Terutama aktivitas masyarakat pada malam hari yang cenderung lebih terkonsolidasi. **(Dhi)-f**

Ajak Bersatu Lawan Covid-19 MAN 1 Yogya Sosialisasikan 5M Plus MIO



KR-Istimewa

Sosialisasi prokes Covid-19 dari MAN 1 Yogyakarta.

YOGYA (KR) - MAN 1 Yogyakarta mengajak semua pihak serius mencegah penyebaran Covid-19. Sebagai bentuk realisasi, madrasah tersebut menyediakan sarana prasarana yang terangkum dalam gerakan 5M.

"Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan mengingat pandemi yang hingga kini belum mereda.

Tentunya hal ini membutuhkan kerja sama semua anak bangsa dan lapisan masyarakat untuk bergotong royong, dalam mencegah penyebaran Covid-19," kata Kepala MAN 1 Yogyakarta Drs H Wiranto Prasetyahadi MPd, Senin (8/2).

Ditambahkan, MAN 1 Yogyakarta juga melakukan edukasi dan sosialisasi seluas-luasnya baik melalui me-

dia sosial ataupun secara langsung kepada masyarakat sekitar. Seperti sosialisasi dan edukasi tentang gerakan 5M plus makan berkualitas, istirahat yang cukup dan olah raga teratur (MIO). Bahkan, segenap civitas akademika MAN 1 Yogyakarta juga melakukan edukasi ke masyarakat dan pengguna jalan secara langsung, yaitu di perempatan Supermarket Miroti Kampus antara Jalan Terban, Jalan Sarjito dan Jalan C Simanjuntak.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah petugas membawa spanduk dan membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan. "Ayo disiplin, putuskan mata rantai penyebaran Covid-19, jalankan protokol kesehatan patuhi 5M plus MIO," tegasnya. **(Feb)-f**

PEKAN DOA SE DUNIA Persatuan Umat Kristiani Lawan Covid-19

YOGYA (KR) - Umat Kristiani di DIY terdiri dari Umat Katolik dan Umat Kristen dari beragam denominasi, menggelar Ibadah Oikoemene (Bersama) dalam momen Pekan Doa Sedunia, Senin (8/2) sore di GKJ Gondokusuman Yogya. Ibadah dengan kehadiran terbatas, disiplin prokes ini disiarkan secara virtual, bisa diikuti Umat Katolik dan Kristen.

"Pekan Doa se Dunia semakin mengokohkan kesatuan umat Kristiani di DIY. Mendukung dengan doa upaya pemerintah dalam memutuskan mata rantai penularan Covid-19 dengan disiplin prokes 5 M, memakai masker mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilasi dan interaksi," jelas Ketua Badan Kerja Sama Gereja-gereja Kristen (BKS-GK) DIY Pdt Agus Haryanto, dalam sambutannya. Agus menyebutkan sesuai



KR-Franz Boedisokamanto

Pastur/Romo dan Pendeta memimpin Doa Oikoemene dalam rangkaian Pekan Doa Sedunia, Senin (8/2) sore di GKJ Gondokusuman.

tema tahun ini "Tinggalah di dalam kasihKu maka kamu akan berbuah banyak", maka semangat kasih di masa pandemi ini juga disertai dengan hidup berbagi, membantu sesama yang terdampak bencana.

Sedang Ketua Panitia Rm Martinus Joko Lelono Pr dan Pdt Seno Adhi Nugroho membentuk, Ibadah Oikoemene yang memasuki tahun ke-6 Pekan Doa se

Dunia tahun sebelumnya bisa diikuti 1.300 umat Kristiani di gereja. "Tahun ini meski terbatas hanya 30-an yang diperkenankan berkumpul namun bisa diikuti virtual," ujarnya.

Demikian pula Romo Viker DIY, Rm Adrianus Maradiyo Pr dalam sambutan melalui video menyatakan persaudaraan indah akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan di

tengah tengah umat dan masyarakat. "Doa bersama sebagai wujud persatuan umat Kristiani bukan ritual semata namun bisa ditindaklanjuti," ujarnya

Doa Oikoemene ini dipimpin bersama/bergantian oleh Romo/Pastur dan pendeta terdiri dari Rm Martinus Joko Lelono Pr, Rm A Yudono Suwondo SJ, Rm F E fendi Kusuma SJ, Rm Thomas Septi Widhiyudana SJ, Rm Agustinus Suryo Nugroho Pr, Pdt Seno Adhi Nugroho, Pdt Kristi, Pdt Gunawan Adi Prabowo, Pdt Naftali Simson, Pdt Daniel Pujarsono, Pdt Pracyaningtyas.

Sebelumnya Wagub DIY KGPAAPaku Alam X dalam audio visual mengapresiasi Pekan Doa Bersama untuk menjaga kedamaian di lingkungan dan cerminkan nilai-nilai kerukunan dan persatuan. Selalu jaga kesehatan dengan prokes dan mari mendukung vaksinasi program pemerintah," ujarnya. **(R-4)-f**

WASPADAI BENCANA HIDROMETEOROLOGI DIY Masuk Puncak Musim Hujan

YOGYA (KR) - Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan gelombang tinggi, bisa menjadi ancaman setiap saat. Terlebih di puncak musim penghujan seperti sekarang. Guna mengantisipasi hal itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

"Adanya ancaman bencana hidrometeorologi yang kemungkinan terjadi, kami minta agar masyarakat waspada. Bentuk kewaspadaan itu bisa melalui berbagai kegiatan, mulai sosialisasi ke RT/RW, perangkat desa, pemuka masyarakat sampai forum pengurangan risiko bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana di Bangsal Kepatihan, Senin (8/2).

Diungkapkan, pengurangan risiko bencana bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi bencana ancaman di lingkungannya. Artinya, upaya mitigasi selalu dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya saat awal musim penghujan sudah melakukan sosialisasi ke pengurus

desa tangguh bencana (Destana) serta mengajak BMKG menyampaikan prediksi cuaca yang kemungkinan terjadi. Dengan cara tersebut antisipasi terhadap datangnya bencana alam diharapkan bisa secara optimal.

"Guna memudahkan koordinasi khususnya yang berkaitan dengan kewaspadaan dan antisipasi bencana, kami sudah melakukan pemetaan kawasan rawan bencana yang sudah ditetapkan dalam Perda DIY No 5 Tahun 2019. Dimana ada 7 kawasan rawan bencana meliputi erupsi Gunung Merapi, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan," terangnya.

Lebih lanjut Biwara menambahkan, guna meminimalisir kerugian akibat bencana alam, sejumlah upaya terus dilakukan mulai dari pencegahan, pemetaan daerah rawan bencana sampai kesiapsiagaan masyarakat. Agar hasilnya optimal, pihaknya juga meminta masyarakat selalu mentaati dan mengikuti informasi BMKG tentang prediksi cuaca. Karena keberadaan informasi cuaca tersebut sangat penting sebagai bahan panduan dalam melaksanakan kegiatan masyarakat. **(Ria)-f**